

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Indonesia merupakan sebuah negara dengan jumlah penduduk yang sangat besar. Dengan kondisi tersebut, pemerintah menyadari masih banyak terjadi kesenjangan antara pencapaian dan sasaran dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini terbukti dari masih besarnya angka kemiskinan dan pengangguran di Indonesia.

Pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan merupakan indikator penting dalam melihat keberhasilan pembangunan suatu negara. Setiap Negara akan berusaha keras untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang optimal dan menurunkan angka kemiskinan. Di banyak negara di dunia syarat utama bagi terciptanya penurunan kemiskinan adalah pertumbuhan ekonomi. Namun, kondisi di negara-negara berkembang termasuk Indonesia pertumbuhan ekonomi yang dicapai ternyata juga diiringi dengan munculnya permasalahan meningkatnya jumlah penduduk yang hidup dibawah garis kemiskinan.<sup>2</sup>

Kemiskinan diketahui sebagai permasalahan yang kompleks, dimana melibatkan faktor-faktor yang saling berkaitan, antara lain: tingkat pendapatan, kesehatan, pendidikan, akses terhadap barang dan jasa, lokasi geografis, jender dan kondisi lingkungan. Kompleksnya permasalahan

---

<sup>2</sup> Jonnadi, A., Amar, S., & Aimon, H. (2012). Analisis pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan di indonesia. *Jurnal Kajian Ekonomi*, 1(1), 2.

kemiskinan ini, membuat upaya pengentasan kemiskinan akan terasa cukup sulit. Berbagai penanggulangan kemiskinan menjadi agenda penting pembangunan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.<sup>3</sup>

Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan, merupakan salah satu isi dari Sembilan program Nawacita Presiden dan Wakil Presiden Indonesia. Hal ini di nilai mempunyai kebijakan yang strategis, di mana menguatkan daerah terendah yaitu desa untuk menjadi tonggak kedaulatan secara Nasional untuk dapat bersaing secara global.

Setiap daerah akan meningkatkan kemajuannya sesuai bidangnya seperti bidang sosial, budaya, politik, maupun ekonomi, terutama dalam bidang perekonomian. Pembangunan perekonomian merupakan salah satu penopang suatu daerah untuk mencapai skala Nasional, maka pemerintah harus dapat menggali, mengolah dan membina masyarakat untuk mencapai potensi di setiap daerah tersebut.

Segala potensi yang ada di desa dapat di kelola mulai dari sumber daya alam (tumbuhan, air, hewan, batu, minyak bumi) sumber daya manusia, sumber daya budaya, dan sumber daya usaha (modal). Sehingga pemerintah dapat mengayomi masyarakat dengan melaksanakan kegiatan-kegiatan untuk membantu dan membina dalam pelaksanaannya. Dengan begitu eksistensi desa harus mendapat perhatian yang serius dari pemerintah dengan adanya

---

<sup>3</sup> Nopriansyah, N., Junaidi, J., & Umiyati, E. (2015). Determinan Kemiskinan Rumah Tangga di Provinsi Jambi. *Jurnal Perspektif Pembiayaan dan Pembangunan Daerah*, 2(3), 119.

kebijakan-kebijakan terkait pemberdayaan ekonomi yang di lakukan secara menghimpun dan melembagakan kegiatan ekonomi masyarakat.

Tujuan utama dari pemberdayaan ekonomi yaitu untuk mengentaskan kemiskinan. Terkait dengan kemiskinan, isu penting yang perlu mendapat perhatian adalah masih relatif banyaknya jumlah penduduk miskin. Jumlah penduduk yang relatif banyak berkaitan dengan upaya-upaya yang telah dilakukan dalam pemberdayaan dan pengentasannya, baik melalui bantuan pendanaan oleh pemerintah pusat, pemerintahan daerah sampai pemerintahan desa. Namun demikian, upaya yang sedemikian tinggi kuantitasnya tersebut belum secara signifikan dapat mengentaskan kemiskinan. Terlihat dari masih banyaknya jumlah penduduk miskin.<sup>4</sup>

Oleh karena itu untuk menghambat peningkatan jumlah pengangguran dan kemiskinan, pemerintah melakukan berbagai upaya kebijakan melalui program bantuan sosial untuk mengembangkan perekonomian di daerah pedesaan. Program-program tersebut diantaranya adalah BUMDes. BUMDes atau lebih dikenal dengan badan usaha milik desa ini berasal dari beberapa kata yaitu badan usaha yang diartikan kesatuan yuridis (hukum) teknis, dan ekonomis yang bertujuan mencari laba atau keuntungan.

Di beberapa daerah, keberadaan lembaga BUMDes belum begitu dikenal masyarakat, padahal BUMDes dibentuk untuk menopang perekonomian masyarakat tingkat desa. Selain itu, kemampuan masyarakat

---

<sup>4</sup> Dwiandana Putri, A., & Setiawina, D. (2013). Pengaruh umur, pendidikan, pekerjaan terhadap pendapatan rumah tangga miskin di Desa Bebandem. *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana*, 2(4), 86.

dalam mengakses informasi mengenai kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pemerintah desa terkait dengan regulasi tentang BUMDes pun juga belum mampu memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk melakukan pinjaman modal ke BUMDes. Banyak diantara masyarakat lebih memilih melakukan peminjaman ke lembaga keuangan lainnya, sehingga potensi kinerja BUMDes di beberapa daerah belum terealisasi secara optimal.

Sedangkan milik dapat diartikan sebagai kepemilikan dan desa merupakan kesatuan wilayah yang dihuni sejumlah keluarga yang memiliki sistem pemerintahan (KBBI) dengan demikian BUMDes merupakan usaha yang dilakukan pemerintahan yang terdapat hukum didalamnya secara teknis dalam sektor perekonomian masyarakat. Dalam wilayah yang lebih luas BUMDes dinaungi oleh BUMDesma yaitu badan usaha milik desa bersama, yang mana meliputi desa-desa yang terbentuk atas musyawarah antar desa. Kebutuhan akan modal tersebut sebenarnya dapat dipenuhi oleh lembaga.

BUMDesma melalui pembiayaan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) dan Usaha Ekonomi Produktif (UEP). Akan tetapi, pengetahuan masyarakat tentang kedua jenis pembiayaan tersebut sangatlah minim. Hal ini disebabkan pada tahun 2015 program PNPM mandiri sebagai induk pembiayaan SPP dan UEP telah dibubarkan. UPK sebagai pihak pengelola sudah tidak memiliki hak dan kewajiban mengelola dana tersebut, dari kejadian itu masyarakat mengira pembiayaan SPP dan UEP sudah tidak akan ada lagi.

Musyawarah antar desa yang diadakan di Kecamatan Talun Kabupaten Blitar diantaranya Kepala Desa Tumpang, Kepala Desa Jabung, Kepala Desa

Jeblog, Kepala Desa Bendosewu, Kepala Desa Duren, Kepala Desa Wonorejo, Kepala Desa Sragi, Kepala Desa Jajar, Kepala Desa Pasirharjo, Kepala Desa Kendalrejo.

Dalam Musyawarah antar desa tersebut menetapkan dalam peraturan bersama Nomor 01 Tahun 2015 tentang Kerjasama Antar Desa untuk pelestarian asset dan pelaksanaan kegiatan Progam Nasional Pemberdayaan Masyarakat Pasca Krisis, Progam Nasional Pemberdayaan Masyarakat Integrasi, Kegiatan Perekonomian, Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Kawasan Perdesaaan.

BUMDesma bertanggung jawab untuk mengimplementasikan kerja sama Desa. Hal ini berdasarkan UU pasal 92 ayat 6 tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah No 43 pasal tahun 2014 sebagai peraturan pelaksanaan UU no 6 tahun 2014 tentang pengenalan BUMDesa Bersama. yang merupakan bagian dari iktiar mencapai keberdayaan Negara dari kemandirian desa-desa nya. Untuk mewujudkan desa yang mandiri di perlukan adanya strategi pembangunan. Di berlakukan UU No 6 tahun 2014 tentang desa maka menjadi peluang yang sangat besar bagi setiap desa yang ada di Indonesia untuk bisa mengembangkan setiap potensi yang di miliknya secara mandiri sesuai kebutuhan masing-masing dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat.<sup>5</sup>

Sehubungan dengan hal itu, pemerintah diharapkan mampu menggerakkan roda perekonomian di Meskipun dalam Undang-Undang Desa

---

<sup>5</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 72 pasal 78 ayat 1 tahun 2005 tentang Desa

dan BUMDesma tidak mengatur secara tegas tentang perjanjian dikarenakan setiap melakukan kerjasama, tetapi dalam praktiknya pihak BUMDesma membuat perjanjian untuk memikat antara pihak BUMDesma dengan kelompok masyarakat di Kecamatan Talun Kabupaten Blitar. Hal tersebut bertujuan untuk memberdayakan kelompok masyarakat. Sebagaimana Abu Hurairah mengatakan bahwa pemberdayaan masyarakat adalah sebuah proses dalam bingkai usaha memperkuat apa yang lazim disebut *community self-reliance* atau kemandirian.<sup>6</sup>

Pemberdayaan dapat dilihat dari sisi keberadaannya sebagai suatu program ataupun sebagai suatu proses. Pemberdayaan sebagai suatu program dimana pemberdayaan dilihat dari tahapan-tahapan guna mencapai suatu tujuan yang biasanya sudah ditemukan jangka waktunya. Sedangkan pemberdayaan sebagai suatu proses adalah suatu kegiatan yang berkesinambungan (*on going*) sepanjang komunitas itu masih ingin melakukan perubahan dan perbaikan, dan tidak hanya terpaku pada suatu program saja.<sup>7</sup>

Peranan BUMDesma Talun dalam penyelenggaraan Pemerintah desa dan pemberdayaan masyarakat berfungsi memfasilitasi dan melindungi serta mensejahterakan ekonomi masyarakat pedesaan. BUMDes di harapkan menjadi revitalisasi peran pemerintah desa dalam pengembangan ekonomi lokal dan pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Talun Kabupaten Blitar.

---

<sup>6</sup> Abu Hurairah, *Pengorganisasian dan Pengembangan Masyarakat Model dan Strategi Pembangunan yang Berbasis Kerakyatan*, Humaniora, Bandung, 2008. Hlm 87

<sup>7</sup> Adi, Isbandi Rukminto, *Intervensi Komunitas Pengembangan Masyarakat Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat*, Rajawali Pers, Jakarta, 2008, hlm. 83-84

Dengan demikian keberadaan BUMDes sangat strategis, di mana sebagai lembaga milik ekonomi desa akan dapat memberikan peningkatan sumbangan bagi peningkatan sumber asli Pendapatan Desa (PADes), sehingga desa memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan melalui BUMDes untuk meningkatkan perekonomian masyarakat secara mandiri. Sehubungan dengan program BUMDes yang sudah ada di wilayah desa, ada beberapa desa yang berhasil menjalankan program BUMDes.

Perlu diketahui bahwa persentase jumlah penduduk miskin di Indonesia yang terbanyak terdapat pada daerah pedesaan, sehingga kesejahteraan masyarakat desa dapat dikategorikan masih rendah. Hal ini dikarenakan masyarakat desa mengalami keterbatasan modal untuk memulai atau mengembangkan usaha. Kejadian seperti ini juga dialami oleh masyarakat Talun Kabupaten Blitar, usaha mereka merasa terhambat dikarenakan kekurangan modal yang tentunya berakibat terhadap penghasilan mereka yang sulit mengalami kenaikan.<sup>5</sup> Maka dari itu pemerintah mendirikan suatu lembaga BUMDesma yang berfungsi melakukan pembiayaan terhadap masyarakat sehingga kendala keterbatasan modal dapat teratasi.

Proses pembangunan perekonomian desa merupakan mekanisme dari keinginan pemerintah yang dipadukan dengan masyarakat yang mana sebagai bagian dari mekanisme pembangunan desa merupakan perpaduan yang serasi antara kegiatan partisipasi masyarakat dalam pihak dan kegiatan pemerintah di satu pihak.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup> Ahmadi, Abu. *Ilmu Pendidikan*, PT. Rineka Cipta. Jakarta, 2001, hlm.222

Pada hakekatnya pembangunan desa dilakukan oleh masyarakat sendiri. Sedangkan pemerintah memberikan bimbingan, bantuan, pembinaan, dan pengawasan. Upaya pembangunan desa yang dilakukan oleh pemerintah tersebut dapat dilihat berdasarkan Pasal 78 Undang - Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa adalah sebagai berikut:<sup>9</sup>

- a. Pembangunan Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.
- b. Pembangunan desa meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan.
- c. Pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan perdamaian dan keadilan sosial

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2015 tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendesa PDTT), bahwa Kemendesa PDTT merupakan kementerian yang berwenang untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembangunan desa dan kawasan perdesaan, pemberdayaan masyarakat desa percepatan pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi dalam rangka membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan Negara. Lahirnya Undang -

---

<sup>9</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa pasal 78 ayat 1

Undang Desa No.6 Tahun 2014 tentang Desa, dan secara teknis pembangunan ekonomi oleh lembaga Binaan BUMDesma yaitu Unit Pengelola Kegiatan (UPK).

Mekanisme pembangunan ekonomi yang dimaksudkan di atas merupakan penyaluran dana bergulir sebagai bentuk pemberdayaan perekonomian masyarakat di perdesaan. Oleh karena itu penting adanya BUMDesma sebagai tangan panjang pemerintah guna mewujudkan program pemberdayaan masyarakat di kecamatan Talun Kabupaten Blitar.

BUMDesma Gemilang sangat penting diteliti karena dalam BUMDesma tersebut terdapat pengaruh-pengaruh terhadap peningkatan ekonomi masyarakat di Kecamatan Talun Kabupaten Blitar, serta membantu peningkatan pendapatan masyarakat desa setempat. Akan tetapi pada kenyataannya terdapat beberapa masalah atau problem yang menjadi kendala dalam peran BUMDesma Gemilang dalam menyejahterakan masyarakat.

Berdasarkan pemaparan diatas peneliti ingin mengkaji serta menganalisis lebih lanjut tentang *Strategi Pengembangan BUMDesma Gemilang Melalui Program Simpan Pinjam Perempuan (SPP) dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Di Kecamatan Talun Kabupaten Blitar.*

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian di atas, masalah pokok yang penulis kaji dalam penulisan proposal ini adalah:

1. Bagaimana penerapan strategi pengembangan BUMDesma Gemilang melalui program simpan pinjam perempuan (SPP) dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat di kecamatan Talun kabupaten Blitar?
2. Bagaimana penerapan strategi pengembangan BUMDesma Gemilang melalui program simpan pinjam perempuan (SPP) dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat di kecamatan Talun kabupaten Blitar?
3. Apakah Faktor yang mendukung dan menghambat dalam penerapan strategi pengembangan BUMDesma Gemilang melalui program simpan pinjam perempuan (SPP) dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat di kecamatan Talun kabupaten Blitar?

### **C. Tujuan Penelitian**

Dalam penulisan ini, adapun tujuan yang hendak dicapai oleh penulis yaitu sebagai berikut :

1. Untuk mendeskripsikan perencanaan strategi pengembangan BUMDesma melalui program simpan pinjam perempuan (SPP) dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat di kecamatan Talun kabupaten Blitar.
2. Untuk mendeskripsikan penerapan strategi pengembangan BUMDesma melalui program simpan pinjam perempuan (SPP) dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat di kecamatan Talun kabupaten Blitar.
3. Untuk mendeskripsikan Faktor yang mendukung dan menghambat dalam penerapan strategi pengembangan BUMDesma melalui program simpan pinjam perempuan (SPP) dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat di kecamatan Talun kabupaten Blitar.

#### **D. Batasan Masalah**

Pembatasan masalah disini bertujuan sebagai acuan dasar dalam melakukan penelitian yang lebih terarah dan memudahkan dalam mencapai tujuan dari suatu penelitian, maka batasan penelitian ini lebih difokuskan pada peranan BUMDesma Gemilang dapat membantu sektor ekonomi masyarakat melalui pembiayaan-pembiayaan yang dilakukan, bukan bersifat lebih kompleks seperti sosialisasi kepada masyarakat tentang program-program dari pihak Kecamatan, karena dalam BUMDesma terdapat instansi Badan Kerja Sama Antar Desa yang didalamnya mengemban peran sosial terhadap masyarakat Kecamatan Talun.

Dengan Penelitian ini, penulis akan melakukan pembatasan masalah sesuai dengan judul yang dilakukan, yaitu *“Strategi Pengembangan BUMDesma Gemilang Melalui Program Simpan Pinjam Perempuan (SPP) dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Di Kecamatan Talun Kabupaten Blitar”*.

#### **E. Manfaat penelitian**

##### **1. Secara Teoritis**

Hasil penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat menambah wawasan dan pemahaman mengenai Penerapan Strategi Pengembangan BUMDesma melalui program Simpan Pinjam Perempuan (SPP) dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di Kecamatan Talun Kabupaten Blitar.

##### **2. Secara Praktis**

###### **a. Bagi Peneliti**

1. Untuk Mengetahui sejauh mana peranan BUMDesma Gemilang Dalam Mengembangkan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Di Kecamatan Talun Kabupaten Blitar
2. Untuk syarat kelulusan jenjang Sarjana 1 Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) Institut Agama Islam Negeri Tulungagung (IAIN Tulungagung)

b. Bagi Akademisi

Semoga penelitian ini dapat menjadi rujukan dalam penelitian yang serupa dan sebagai wawasan keilmuan perpustakaan Institut Agama Islam Negeri Tulungagung.

c. Bagi BUMDesma Gemilang

Sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan yang akan diterapkan dalam BUMDesma agar dapat tepat guna bagi masyarakat Kecamatan Talun Kabupaten Blitar.

d. Bagi Pembaca

Sebagai tambahan informasi, pengetahuan dan referensi untuk dapat diambil manfaatnya bagi pembaca.

## **F. Penegasan istilah**

Untuk menghindari kesalah pahaman dalam memahami istilah yang terdapat dalam penelitian dengan judul “*Strategi Pengembangan BUMDesma Gemilang Melalui Progam Simpan Pinjam Perempuan (SPP) dalam*

*Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Di Kecamatan Talun Kabupaten Blitar*”. Maka diperlukan suatu penjelasan, beberapa istilah diantaranya:

## 1. Secara Konseptual

### a. Strategi Pengembangan

Strategi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah ilmu siasat perang, atau bisa juga disebut sebagai akal untuk mencapai sesuatu maksud dan tujuan yang telah direncanakan.<sup>10</sup> Konsep strategi sering digunakan dalam dunia bisnis dimana strategi menggambarkan arah bisnis yang mengikuti lingkungan bisnis yang dipilih dan merupakan pedoman dalam mengoptimalkan sumberdaya yang ada diorganisasi bisnis.

Secara istilah strategi merupakan alat untuk mencapai tujuan perusahaan dalam kaitannya dengan tujuan jangka panjang, program tindak lanjut serta prioritas alokasi sumber daya.<sup>11</sup> Sedangkan pengembangan adalah suatu usaha untuk meningkatkan kemampuan teknis, teoritis, konseptual, dan moral karyawan sesuai dengan kebutuhan pekerjaan/ jabatan melalui pendidikan dan latihan. Pengembangan dapat didefinisikan sebagai usaha untuk memajukan atau meningkatkan atau memperbaiki sesuatu yang sudah ada sehingga memiliki nilai yang lebih tinggi.<sup>12</sup>

### b. BUMDesma

---

<sup>10</sup> Sucipto Suntuoro, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Solo: Hamada Putra, 2008), Hal. 396

<sup>11</sup> Husein Umar, *Desain Penelitian Manajemen Strategik*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), Hal. 16-17

<sup>12</sup> Aisyah Nurul Fitriana, Irwan Noor, Ainul Hayat, *Pengembangan Industri Kreatif di Kota Batu*, (Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol. 2 No. 2), Hal. 283

BUMDes merupakan usaha yang dilakukan pemerintahan yang terdapat hukum didalamnya secara teknis dalam sektor perekonomian masyarakat. Dalam wilayah yang lebih luas BUMDes dinaungi oleh BUMDesma yaitu badan usaha milik desa bersama, yang mana meliputi desa-desa yang terbentuk atas musyawarah antar desa.<sup>13</sup>

#### c. Pemberdayaan Masyarakat

Upaya mempersiapkan masyarakat seiring dengan langkah memperkuat kelembagaan masyarakat agar mereka mampu mewujudkan kemajuan, kemandirian, dan kesejahteraan dalam suasana keadilan sosial yang berkelanjutan.<sup>14</sup>

#### 2. Secara Operasional

Penegasan operasional merupakan hal yang sangat penting dalam penelitian guna memberi batasan kajian pada suatu penelitian. Berdasarkan penegasan konseptual di atas maka secara operasional yang dimaksud dengan “*Strategi Pengembangan BUMDesma Gemilang Melalui Progam Simpan Pinjam Perempuan (SPP) dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Di Kecamatan Talun Kabupaten Blitar*” merupakan suatu perencanaan, pelaksanaan strategi atau cara yang dilakukan untuk mengembangkan BUMDesma Gemilang Kecamatan dengan melalui progam simpan pinjam perempuan dalam memberdayakan masyarakat.

#### G. Sistematika Penulisan

---

<sup>13</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa pasal 78 ayat 1

<sup>14</sup> I Nyoman Sumaryadi, *Pemberdayaan Pembangunan Daerah Otonom dan Pemberdayaan Masyarakat*, (Jakarta, CV. Citra Utama 2005), hal. 11

Skripsi ini disusun dalam sistematika pembahasan yang terdiri dari 3 bagian yaitu, bagian bagian awal, bagian utama, dan bagian akhir. Bagian awal skripsi ini memuat hal-hal yang bersifat formalitas tentang halaman sampul depan judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, motto, persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar lampiran dan abstrak. Kemudian bagian utama terdiri dari:

BAB I meliputi Pendahuluan, bab ini terdiri dari konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, pembatasan masalah, kegunaan penelitian, penegasan istilah, dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II meliputi Kajian Pustaka, mencakup landasani teori mengenai pengertian Strategi, BUMDesma, pemberdayaan masyarakat, penelitian terdahulu dan kerangka berfikir.

BAB III meliputi Metode penelitian, mencakup rancangan penelitian, kehadiran peneliti, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian.

BAB IV meliputi paparan hasil penelitian, temuan hasil penelitian dan analisa penemuan penelitian.

BAB V meliputi pembahasan pembahasan hasil penelitian

BAB VI meliputi penutup, kesimpulan dan saran

Pada akhir bagian laporan penelitian disertakan daftar pustaka, lampiran-lampiran dan biodata penulis.